

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR: 238/KPTS/1982.

TENTANG :

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA NOMOR: 2 TAHUN 1978 TENTANG: PENGHUNIAN,  
PENYEWAAAN DAN PENGEMBALIAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN  
PEMUGARAN PASAR.

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Membaca : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2  
Tahun 1978 tentang: Penghunian, Penyewaan dan Pengembalian Kredit  
Pembangunan dan Pemugaran Pasar.

Menimbang: Bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor: 2 Tahun 1978 dimaksud.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974.  
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan  
ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 26 Tahun 1959 jo  
Perturan Pemerintah Nomor: 31 Tahun 1950.  
3. Undang-undang Nomor: 16 Tahun 1950.  
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1976 jo  
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 1977.  
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 6 Tahun 1959.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : I. Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogya-  
karta Nomor; 2 Tahun 1978 tentang: Penghunian, Penyewaan dan Pengem-  
balian Pembangunan dan Pemugaran Pasar, dengan penyempurnaan/  
perubahan sebagai berikut :

- Pada pasal 2 ayat (6) diubah sehingga berbunyi :  
(6) Pemindahan hak/balik nama tersebut ayat (5) pasal ini  
dikenakan biaya administrasi yang besarnya akan diatur  
kemudian dengan Peraturan Daerah.

II. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 12 Nopember 1982.

WAKIL GUBERNUR

KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD.

Salinan Keputusan ini disampaikan  
kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. DIRJEN PUOD DEPDA GRI di Jakarta.
3. Pimpinan DPRD Propinsi DIY.
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Dati II Yogyakarta.
5. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi DIY.
6. Inspektorat Wilayah Propinsi DIY.
7. Bappeda Propinsi DIY.
8. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DIY.
9. Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY.
10. Biro Bina Pembangunan Setwilda Propinsi DIY.
11. Biro Keuangan Setwilda Propinsi DIY.
12. Biro Umum Setwilda Propinsi DIY.
13. Biro Humas dan Protokol Setwilda Propinsi DIY.

PAKU ALAM VIII.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY.  
Bag. Dokumentasi Hukum.

SUMARSONO BA.  
NIP: 490008844.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
di ... ..